



Kesenjangan sosial dan diskriminasi penduduk campuran (Mestizos) di Hindia Belanda dalam kurun abad 18-19

Moch. Dimas Galuh Mahardika^{1*}, Muhammad Yusuf Efendi²

Sebelas Maret University, Batu, dimas.dg20@gmail.com

State University of Malang, Lamongan, yusufmye@gmail.com

*Corresponding email: dimas.dg20@gmail.com

Abstract

When the Dutch came to power in the East Indies Islands, indo-Europeans or mestizo or "anak kolong" were considered a bad image for Europeans. They were born as a result of marital relations between European men and bumiputra women. Europeans think that the mistresses (nyai) are guilty of the birth of Indo-European children. Though the combination of two cultures that enter the life of the community makes them accustomed to coexistence between the two. Classification in colonial societies made the difference even more pronounced, indo-Europeans increasingly marginalized by social gap and discrimination. Discriminatory policies that put Europeans first in terms of jobs, education, create resentment and frustration among Indo-Europeans. Those who are increasingly depressed due to the difficulty of living in the Dutch East Indies take shortcuts by committing criminal acts such as opium smuggling, theft, and prostitution. This article written with historiographical methods attempts to recount the lives of mixed-blooded populations as one of the contributions of the field of social history studies. This presentation is expected to be an alternative to historical discussions that may not be written much in the official historical narrative.

Keywords

Indo-Europeanen, discrimination, criminal.

Abstrak

Saat Belanda berkuasa di Kepulauan Hindia Timur, orang-orang Indoeropa atau mestizo atau anak kolong dianggap sebagai citra buruk bagi kalangan orang-orang Eropa. Mereka lahir akibat hubungan perkawinan/pergundikan antara lelaki Eropa dan perempuan bumiputra. Orang-orang Eropa beranggapan bahwa para gundik (nyai) bersalah atas kelahiran anak Indoeropa. Padahal perpaduan dua budaya yang masuk dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terbiasa hidup berdampingan di antara keduanya. Klasifikasi dalam masyarakat kolonial membuat perbedaan semakin terasa, orang-orang Indoeropa semakin terpinggirkan dengan adanya kesenjangan sosial dan diskriminasi. Kebijakan diskriminatif yang mengutamakan orang-orang Eropa dalam hal pekerjaan, pendidikan, menciptakan rasa dendam dan ketidaknyamanan di kalangan orang-orang Indoeropa. Perempuan yang semakin tertekan akibat sulitnya kesempatan hidup di Hindia Belanda mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal seperti penyelundupan opium, pencurian, dan prostitusi. Artikel yang ditulis dengan metode historiografi ini mencoba untuk menceritakan kehidupan penduduk berdarah campuran sebagai salah satu kontribusi bidang kajian sejarah sosial. Pemaparan ini diharapkan dapat menjadi alternatif diskusi sejarah yang mungkin belum banyak ditulis di dalam narasi sejarah resmi.

Kata kunci

Indoeropa, diskriminasi, kriminal.

**Received: 2 January 2022*

**Revised: 23 March 2022*

**Accepted: 29 April 2022*

**Published: 30 April 2022*

Pendahuluan

Istilah Indo berasal dari kata Indisch dalam bahasa Belanda berasal dari kata sifat hasil bentukan dari kata Hindia (Indie), yang merujuk pada daerah koloni orang-orang Belanda di Asia Tenggara yang di kemudian hari menjadi Indonesia. Pada awalnya konsep Indis senantiasa diasosiasikan dengan Hindia Belanda. Pengertian Indis tidak lain adalah sifat ke-Hindiaan. Oleh karenanya muncul istilah kebudayaan, kota-kota, atau komunitas Indis yang lahir sebagai akibat atau pengaruh adanya penjajahan Barat. Pengaruh ini dalam banyak hal meninggalkan jejak dalam bentuk percampuran antara barat dan timur. Indis mengacu pada berbagai bentuk percampuran antara pengaruh Barat dengan unsur lokal. Istilah Indis lebih mengacu kepada komunitas penduduk Eropa dan keturunannya di Hindia Belanda, karena komunitas ini lebih banyak didominasi oleh keturunan campuran maka istilah Indis lebih diidentifikasi sebagai kelompok keturunan Eropa dan Asia yang biasanya disebut Indoeropa—atau yang lebih dikenal dengan Indo saja— dan Eurasia, khususnya mereka yang lahir dan tinggal di Hindia Belanda (Klaveren, 1983; Niwandhono, 2011; Soekiman, 2011).

Sejarah awal munculnya penduduk Indoeropa dapat dilacak hingga masa-masa awal terbentuknya kota Batavia. Tepatnya pada 30 Mei 1619, ketika kongsi dagang Belanda di Hindia Timur VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) di bawah pimpinan J.P. Coen berhasil menguasai kota pelabuhan tersebut setelah mengalahkan orang-orang Inggris dan Banten. Kota Batavia kemudian dibangun untuk memenuhi kebutuhan dari kongsi dagang Belanda: pertama, sebagai markas besar VOC di Kepulauan Hindia Timur, kedua, sebagai pusat aktivitas perdagangan, dan ketiga, sebagai pusat bagi wilayah pedalaman agraris. Penguasa VOC dapat menerima perbedaan-perbedaan kultural yang terdapat dalam masyarakat kolonial selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma kebudayaan Belanda sendiri. Bahkan, atas dasar prinsip *divide et impera*, pihak penguasa cenderung menempuh kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya asimilasi antar kelompok masyarakat. Antisipasi tersebut terlihat dari segregasi ras dalam pengelompokan tempat tinggal berdasarkan etnisitas tertentu, sehingga muncul perkampungan-perkampungan yang membawa nama etnisnya seperti Kampung Ambon, Kampung Melayu, dan beberapa kampung di wilayah lainnya (Niwandhono, 2011).

Mengingat pada masa awal kolonial hampir tidak didapati perempuan Eropa maka banyak dari kalangan penduduk Belanda yang tinggal di Batavia, termasuk pejabat VOC mengambil perempuan-perempuan Asia tersebut berperan sebagai gundik atau yang lebih dikenal dengan sebutan nyai untuk dijadikan sebagai pasangannya (Baay, 2010; Coppel, 1997). Gubernur Jenderal Carel Reyniersz, dan penggantinya, Joan Maetsuyker merupakan tokoh yang cukup mendukung terjadinya perkawinan antara pegawai VOC dengan

perempuan Asia/bumiputra. Menurut keduanya, perkawinan tersebut memiliki beberapa keuntungan bagi pemerintah kolonial. Para perempuan Asia dianggap lebih menguntungkan ketimbang perempuan-perempuan Eropa, pertama karena untuk mendatangkan wanita Eropa ke tanah koloni membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan biaya tersebut ditanggung oleh sang laki-laki. Kedua, gaya hidup perempuan bumiputra lebih sederhana sehingga laki-laki tidak perlu menggelontorkan banyak biaya untuk mencukupi hidup sang perempuan. Akibat adanya perkawinan campur ini kemudian turut meningkatkan kuantitas populasi penduduk di Hindia-Belanda, khususnya di kota-kota pusat administratif dan perdagangan (lihat Tabel 1).

Rasa cinta dengan tanah kelahiran membuat perempuan bumiputra yang melakukan perkawinan dengan laki-laki Eropa ingin tetap tinggal di tanah kelahirannya, sehingga perempuan tersebut membujuk suaminya untuk melakukan hal serupa. Perempuan bumiputra memiliki sifat sederhana dibandingkan perempuan Eropa. Perempuan bumiputra dapat hidup dari penghasilan suami yang relatif kecil, oleh karenanya dapat diasumsikan bahwa tindakan korupsi dari para pegawai pemerintah kolonial akan dapat diminimalisir. Perkawinan-perkawinan ini di kemudian melahirkan keturunan, anak laki-laki akan menjadi calon pegawai pemerintah kolonial dan anak perempuan akan menjadi calon pengantin yang sempurna untuk angkatan baru pegawai VOC dan pegawai Eropa lainnya (Baay, 2010; Hewett, 2015).

Tabel 1. Data Populasi di Batavia Tahun 1788

Dalam Tembok Kota		Di Luar Tembok Kota	
Orang Eropa	475	Orang Belanda	430
Indoeropa/Mestizos	249	Indoeropa/Mestizos	150
Kristen Bumiputra	1320	<i>Mardijkers</i>	32508
Cina	1320	Cina	391
Islam	551	Ambon	391
Budak	4221	Banda	528

(sumber: Niwandhono, 2011)

Penduduk Indoeropa atau mestizo dikategorikan sebagai bangsa Eropa, tetapi status sosial mereka sangat tergantung pada keluarga yang membentuknya. Seorang Indo yang lahir dari seorang perempuan Asia berstatus rendah, sebagai budak atau gundik dan biasanya adalah golongan bumiputra dapat hidup dengan status rendah jika tidak diangkat ke status ayahnya. Perempuan Indoeropa atau mestizo yang menikahi para pejabat tinggi VOC sangat menentukan iklim sosial dalam masyarakat kolonial pada waktu itu. Mereka merupakan elemen dasar budaya mestizo, yaitu budaya besar yang mendominasi masyarakat Eropa di Hindia Belanda dan terus berlangsung hingga abad ke-19. Jika perempuan Hindia Belanda, istri pejabat tinggi (seperti anggota dewan atau ketua pengadilan tinggi), mereka pasti memiliki pelayan laki-laki Eropa. Hal ini merupakan ciri khas

kedudukan tinggi mereka dalam masyarakat VOC. Para perempuan ini sering memperlihatkan sikap tidak merasa terganggu dengan kemewahan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan untuk sebanyak mungkin memamerkan harta kekayaan. Para elite dan golongan atas memiliki kepentingan untuk mempertahankan perbedaan dan hierarki yang jelas dalam tatanan kemasyarakatan (Baay, 2010).

Pernikahan pada masa ini relatif sedikit karena hanya laki-laki berpangkat tinggi yang bisa menikah, sehingga praktik pergundikan lebih marak terjadi antara laki-laki Eropa dengan perempuan bumiputra (Baay, 2010). Golongan yang lebih banyak pada masa ini adalah pegawai rendahan dan serdadu laki-laki yang berasal dari berbagai negara di Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, Denmark, Skotlandia, dan Inggris. Mereka memiliki interaksi paling banyak dan cukup akrab dengan situasi sosial penduduk Asia, terutama karena hubungan dengan para budak perempuan Asia. Adanya kebijakan yang membuat pergundikan semakin marak adalah ketika para laki-laki yang bukan berasal dari golongan terpandang tidak dapat menikah tanpa persetujuan atasan VOC. Kebijakan ini berlaku untuk pegawai rendahan maupun penduduk koloni nonbudak. Apabila mereka mengajukan permohonan izin menikah secara resmi dapat ditolak secara langsung tanpa diberi alasan pasti. Pada tahun 1617 juga terdapat larangan menikah untuk mantan pejabat VOC dengan perempuan yang tidak beragama Kristen. Apabila laki-laki Eropa memaksakan diri untuk menikah dengan perempuan Asia, maka hampir dapat dipastikan tidak dapat melakukan repatriasi (Luttikhuis, 2013).

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sejarah (penentuan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi) dengan fokus membahas tentang fenomena penduduk berdarah campuran (mestizos atau Indoeropa) sebagai bagian dari konten perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumber yang digunakan dalam penulisan ini mayoritas tergolong sumber sekunder karena berupa hasil penelitian baik dalam bentuk buku, maupun artikel yang dipublikasi di dalam jurnal ilmiah. Sumber yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi secara konten isi untuk menemukan berbagai informasi yang dapat menunjang penulisan dan fokus pembahasan dalam artikel ini. Hasil telaah dan interpretasi penulis kemudian dituangkan dalam bentuk narasi dalam artikel ini sesuai dengan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Eropanisasi dan Diskriminasi Penduduk Indoeropa

Kemunculan penduduk Indoeropa di Hindia Belanda adalah akibat dari hubungan antara lelaki Eropa dan perempuan Asia. Hubungan seperti ini mendapatkan dukungan dari VOC sebagai salah satu strategi pembentukan komunitas yang mantap dan bertahan di Kepulauan Hindia Timur. Terbentuknya Hindia Belanda secara otomatis disertai dengan pembentukan institusi-institusi baru dalam bidang birokrasi.

Dekade awal abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda telah terbiasa mempekerjakan orang-orang Eropa (Belanda) kelahiran Hindia dan Indoeropa sebagai pegawai pemerintah. Namun sejak tahun 1839, kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah tertutup bagi mereka, untuk selanjutnya dibatasi bagi mereka yang lahir di Negeri Belanda atau terdidik di Eropa. Untuk mendukung usaha tersebut maka pada tahun 1842, Pemerintah Kerajaan Belanda mendirikan Akademi Delft. Keadaan demikian semakin diperburuk sejak dikeluarkannya peraturan yang disebut *Delfse prerogatief* (hak prerogatif Delf) yaitu sebuah peraturan yang mewajibkan calon pegawai pemerintah dengan kedudukan tinggi untuk mengikuti ujian kepegawaian di Akademi Delf terlebih dahulu (Niel, 2009; Veer, 2020). Dengan adanya peraturan ini menjadi penghambat tersendiri bagi orang-orang Indoeropa untuk menjadi pegawai tinggi di lembaga pemerintahan karena kebanyakan orang Indoeropa menempati level ekonomi yang rendah, secara otomatis mereka ini hanya menempati posisi rendah dalam jenjang kepegawaian (Hägerdal, 2009).

Terdapat suatu fakta yang menarik mengenai peningkatan jumlah penduduk Eropa di Hindia Belanda dari tahun ke tahun di Pulau Jawa dan Madura (Lihat Tabel 2). Menurut Lombard (2005), terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan mengenai peningkatan jumlah penduduk Eropa yang cukup pesat tersebut. Pertama, politik kolonial setelah masa *cultuurstelsel* menyebabkan bermunculannya perkebunan milik swasta dan menjadikan Hindia sebagai koloni untuk pemukiman penduduk. Hal serupa disampaikan pula oleh Niwandhono (2011) bahwa dikeluarkannya UU Agraria (*agrarische wet*) 1870 oleh Pemerintah Hindia Belanda telah mendorong terbukanya Jawa bagi modal swasta, sehingga terjadi perubahan masyarakat Eropa di Jawa akibat peningkatan jumlah penduduk Eropa yang mulai memasuki sektor-sektor ekonomi yang semula dikuasai oleh pemerintah. Kedua, terjadi perkembangan pesat sarana angkutan yang menghubungkan Belanda dengan Kepulauan Hindia Timur karena kapal uap mulai digunakan terutama karena pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Perkembangan sarana angkutan sangat menentukan karena pelayaran yang tadinya tiga bulan dapat dipersingkat menjadi sekitar sebulan.

Tabel 2. Peningkatan Jumlah Penduduk Eropa di Jawa dan Madura Tahun 1850-1905

Year	Amount
1850	22.000
1872	36.467
1882	43.738
1892	58.806
1905	80.912

(sumber: Lombard, 2005)

Bahkan dalam kurun waktu 1865-1895 jumlah penduduk Eropa kelahiran Hindia mengalami kenaikan yang cukup signifikan (lihat Tabel 3). Hal demikian terjadi banyaknya meningkatnya penduduk Eropa di Hindia Belanda.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Penduduk Kelahiran Eropa dan Hindia Antara Tahun 1865-1895

Year	The Birth of Europe		The birth of Indies		Total
	Percent	Amount	Percent	Amount	
1865	22,5	6534	77,5	26.945	34.780
1870	22,7	6795	77,3	26.118	34.247
1875	34,4	10.531	65,6	22.900	34.750
1880	30,1	10.781	69,9	29.900	41.676
1885	31,5	13.697	68,5	34.505	50.400
1890	29,5	13.669	71,5	41.386	57.917
1895	31,0	16.758	69,6	43.697	63.315

(sumber: Niwandhono, 2011)

Penduduk Eropa yang semakin besar jumlahnya terlihat lebih padu dan homogen dari sebelumnya. Hal demikian terjadi, karena sejak saat itu bagian terbesar yang bermigrasi adalah perempuan Eropa (Lombard, 2005). Antara tahun 1890 sampai 1920 jumlah laki-laki Eropa yang bermigrasi ke Hindia Belanda mengalami peningkatan hingga mencapai angka 200%, sedangkan perempuan mencapai 300%. Salah satu dampak dari eksistensi perempuan Eropa yaitu Eropanisasi di kalangan penduduk Hindia Belanda. Penduduk Eropa totok menempati lapisan atas masyarakat, sedangkan para penduduk Indoeropa menjadi korban diskriminasi dari kalangan Eropa totok. Sehingga para Indoeropa merasa gelisah dan malu akan darah bumiputra (Hellwig, 2007; Roskies, 1988).

Banyak tulisan yang berasal dari tahun itu, memberikan julukan pada gundik Asia yakni perempuan-perempuan hitam, yang berkelakuan seperti ternak yang bersyahwat. Mereka juga dianggap bodoh, pembohong, dan bisa membunuh orang lain. Anak dari hasil perkawinan antara seorang perempuan (nyai) Asia dan pria Eropa menciptakan citra negatif. Orang Eropa umumnya berpendapat bahwa percampuran kedua ras yang berbeda ini justru mengumpulkan sifat-sifat buruk dari keduanya. Bahkan kalau boleh dikutip, anak-anak Indoeropa tersebut mendapatkan julukan anak kolong (Lombard, 2005). Selain itu, mereka juga menyatakan sikap bumiputra pada orang Indoeropa jauh lebih dominan daripada sikap Eropa (Baay, 2010).

Fenomena pergundikan (nyai) saat itu mulai dipandang sebagai suatu aib bagi kalangan Eropa. Nyai juga disalahkan atas perubahan sikap lelaki Eropa yang hidup seperti seorang bumiputra (inlander, verindischen), dan menjauhi sikap Eropa yang dipandang paling benar. Perempuan Eropa yang mulai berdatangan dipandang sebagai alat untuk perbaikan peradaban golongan Eropa di Hindia Belanda (Boudewijn, 2016). Selain sikap, perbedaan secara fisik juga mendorong munculnya sikap diskriminasi baik

dari kalangan Belanda totok ataupun bumiputra (inlanders) terhadap orang Indoeropa. Orang Belanda totok tidak menerima mereka karena tidak sejajar (ada darah campuran), dan orang bumiputra juga sebagian besar tidak mengakui mereka.

Ketimpangan Sosial Antara Penduduk Indoeropa

Masyarakat Hindia Belanda terdiri dari berbagai macam ras. Menurut (Basherian, 2008; Kat Angelino, 1931) setelah tahun 1850-an pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah peraturan Reegering Reglement (RR) jo Indische Staatsregeling (Stb. 1855-270 jo 1925-415 jo 1925-447) tentang penggolongan penduduk Hindia Belanda berdasarkan ras. Lebih lanjut Niwandhono (2011) menjelaskan bahwa penggolongan atas ras tersebut terbagi dalam tiga kelompok besar. Ketiga kelompok tersebut terdiri dari: Pertama, Eropa (Europeanen) meliputi orang-orang Eropa, Indoeropa dan Jepang. Kedua, Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) meliputi orang-orang Tionghoa, India, dan Arab. Terakhir bumiputra (inlander) terdiri dari berbagai etnis lokal yang hidup di Kepulauan Hindia Timur.

Secara resmi, orang-orang Indoeropa merupakan warga kelas atas atau biasa disebut warga Eropa karena bangsa Indoeropa berasal dari bangsa yang sama dengan bangsa Eropa yaitu berkulit putih (Gouda, 1995). Ketimpangan sosial yang terjadi pada orang-orang Indoeropa semakin nyata ketika J. Th. Koks (dalam Niwandhono, 2011), mengklasifikasikan penduduk Indoeropa berdasarkan tingkat perekonomian, pendidikan, dan warna kulit ke dalam empat lapisan. Pertama, kelompok Indoeropa miskin atau disebut juga Indo kecil (kleine Indo) adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang layak sebagai penduduk Eropa dan hidup bersama-sama dengan bumiputra. Mereka ini biasanya memiliki warna kulit yang lebih gelap daripada penduduk Indoeropa yang lain dan lebih suka berbahasa Melayu. Di Batavia mereka tinggal di daerah Kemayoran, di Semarang mereka tinggal di Karang Bidara, dan di Surabaya mereka tinggal di Krembangan. Kedua, kelompok Indoeropa sebagai pegawai tingkat rendah (kleinambtenaaren). Mereka yang masuk kategori ini adalah orang-orang Indoeropa yang dipekerjakan di lingkungan perkebunan-perkebunan atau industri milik swasta. Ketiga, Indoeropa kelas menengah, mereka adalah orang-orang Indoeropa yang mendapatkan pendidikan rata-rata setingkat HBS (Hoogere Burger School) yaitu berbagai sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk calon pegawai. Keempat, kelompok elit Indoeropa yaitu orang-orang Indoeropa yang mampu mencapai tingkat pendidikan universitas, dengan kata lain mereka mampu pergi bersekolah ke negeri Belanda. Elite Indoeropa ini sering kali disebut dengan istilah sinyo. Salah satu di antara mereka adalah Karel Zaalberg (1873-1928) seorang jurnalis, Ernest Douwes Dekker (1879-1950) seorang nasionalis Indis radikal, Augustijn Michielsz (1769-1833) seorang pemilik tanah swasta terkemuka di Batavia antara tahun 1810-1820-an, dan J.A.C. Dezentje seorang pengusaha Indoeropa yang kaya raya serta memiliki tanah-tanah perkebunan di daerah vorstenlanden (Yogyakarta-Solo) (Lihat gambar 1).



Gambar 1. J.A.C. Dezentje memiliki wajah yang khas perpaduan antara Jawa dan Eropa (sumber: KITLV.nl)

Pada tahun 1850, Residen Batavia melaporkan situasi wilayahnya. Di dalamnya juga memaparkan kedudukan penduduk Indoeropa yang secara nyata merujuk pada diskriminasi dan ketimpangan sosial yang mereka alami:

—Tidak diragukan lagi nasib anak-anak bumiputra memang jauh dari keadaan yang membuat iri. Terlahir dari orang tua (ayah) Eropa dan tidak jarang dibesarkan di tengah kesenangan dan kemewahan, banyak di antara mereka telah menyatu dengan cara hidup dan kebutuhan orang-orang Eropa; tanpa pandangan ke masa depan tentang cara memenuhi kehidupan mereka sendiri. Karir di dalam pemerintahan satu-satunya yang diinginkan di Hindia Belanda— tidak tergapai bagi mereka. Berdasarkan prinsip politik mereka dilarang dari hampir semua keikutsertaan di dalam pemerintahan, bahkan pada jabatan-jabatan rendah (Baay, 2010).

Kondisi pendidikan yang tidak berpihak, kemiskinan, dan penelantaran yang berujung diskriminasi di sepanjang abad ke-19 terus dialami oleh penduduk peranakan Indoeropa. Penduduk Indoeropa memiliki perasaan dendam dan rasa frustrasi terhadap penduduk Eropa tulen. Terlebih lagi ketika orang Eropa tulen yang status sosialnya tidak ingin bersaing dengan eksistensi kaum Indoeropa di bidang pekerjaan selalu mengganggu orang Indoeropa dan berusaha untuk menyingkirkannya dari lingkungan kerja (Bergen, 2019). Bahkan membantu pendatang baru orang-orang Eropa dianggap memiliki nilai prestis tersendiri dengan berlandaskan sebuah asumsi bahwa semakin banyak orang Eropa yang datang, maka Eropanisasi di Hindia Belanda bisa lebih berkembang dengan pesat. Bantuan terhadap orang-orang Eropa baru tersebut terlihat dari surat rekomendasi bertulis HH (Help Hem: tolong dia) atau HHH (Help Hem Haastig: tolong dia secepatnya) yang dibawa oleh orang-orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Setelah pencabutan Delftse prerogatief sebagai syarat untuk menjadi pegawai di Hindia Belanda dan diadakan sebuah ujian besar pegawai pemerintah yang terbuka untuk umum tidak banyak memberikan perubahan yang berarti untuk orang-orang

Indoeropa. Praktik nepotisme dengan mengistimewakan orang Eropa totok daripada ras lain dalam ujian penerimaan pegawai pemerintah tersebut masih sering dilakukan (Baay, 2010).

Banyak di antara orang Indoeropa merasa hidup di negeri kolonial yang tidak bertuan sebagai akibat dari kebijakan diskriminatif yang mereka terima. Baik yang dilakukan oleh orang-orang Eropa maupun orang-orang bumiputra terhadap mereka. Kaum Indoeropa yang berada di luar masyarakat kolonial, baik masyarakat Eropa maupun masyarakat bumiputra semakin tertekan akibat sulitnya kesempatan hidup di Hindia Belanda mengambil jalan pintas dengan cara melakukan tindakan kriminal demi mempertahankan hidup. Cara yang mereka tempuh di antaranya meliputi penyelundupan opium, pencurian, dan prostitusi (Baay, 2010). Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas di antara golongan ini sangat tinggi dan banyak perempuan Indoeropa yang masuk dunia prostitusi. Bahkan, karena di daerah kemiskinan gadis-gadis Indoeropa sering kali menjual dirinya kepada lelaki Tionghoa kaya.

Pencurian yang terjadi di Hindia Belanda khususnya di Jawa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Statistik kriminalitas di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *Koloniale verslagen* (laporan kolonial) dalam kurun waktu 1860–1881 memberikan informasi bahwa jumlah pencurian (*diefstal*)—tidak dibedakan antara pencurian biasa dan perampokan—meningkat perlahan sejak 1853 (lihat Tabel 4). Informasi yang termuat dalam *Koloniale verslagen* tampaknya mendukung pandangan Van Hermerden tentang pencurian dan berkeliarannya bandit-bandit bersenjata sesudah tahun 1961 (Bloembergen, 2011). Kriminalitas yang tinggi tersebut tidak lain disebabkan akibat tindak diskriminasi terhadap orang-orang Indoeropa baik dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan, tindakan tersebut kemudian membawa mereka ke dalam lingkaran setan yang meresahkan masyarakat Eropa sendiri.

Tabel 4. Pencurian yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan di Jawa dan Madura tahun 1860–1881

Year	Theft	Year	Theft
1860	1.988	1871	7.460
1861	2.180	1872	8.651
1862	4.422	1873	8.865
1863	3.766	1874	7.774
1864	4.282	1875	9.087
1865	4.944	1876	9.055
1866	4.790	1877	8.511
1867	5.613	1878	9.553
1868	6.112	1879	9.444
1869	5.786	1880	11.947
1870	6.621	1881	12.078

(sumber: Bloembergen, 2011)

Banyaknya tindak kriminal yang terjadi di Hindia Belanda, mendorong pemerintah untuk segera membentuk suatu institusi khusus untuk menegakkan dan menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) melalui tindakan-tindakan kepolisian. Kemudian dibentuklah Kepolisian kolonial modern (*de Politie*) Hindia Belanda antara tahun 1890 — 1920 sebagai produk ketakutan para penduduk Hindia Belanda. Ketakutan orang-orang Eropa yang sejak tahun 1870 mulai dan semakin sadar akan perubahan yang terjadi dalam masyarakat kolonial dan dunia internasional (Bloembergen, 2011; Ingelson, 2018; Rush, 2013).

Ketimpangan sosial di antara Indoeropa secara jelas digambarkan oleh Henri van Kol seorang anggota parlemen Belanda dalam sebuah rapat parlemen.

—Orang-orang liar itu (Indoeropa) telah menciptakan satu jenis kaum proletar yang menyedihkan. Mereka adalah orang-orang miskin yang merupakan dampak dari kesalahan kita, orang-orang bumiputra dari darah kami... Tingkat kemiskinan di antara orang-orang Indo sangat tinggi, kehidupan mereka menyedihkan dan masa depan mereka suram. Keturunan ras kulit putih ini bertempat tinggal di ratusan rumah di lingkungan kumuh kota-kota di Hindia Belanda serta di perkampungan kotor dekat tangsi-tangsi.... Mereka pun hidup sebagai pengangguran di gubuk-gubuk reyot dalam lingkungan bermoral bobrok dan menyambung hidup hanya dengan usaha ilegal. Yang satu berjudi secara diam-diam, yang lain menyelundupkan candu atau mendulang keuntungan dari rumah-rumah bordil serta menjual kehormatan anak perempuannya (Baay, 2010).

Selain itu, di tahun 1902, Henri van Kol memberikan data statistik cukup mencengangkan perihal ketimpangan yang terjadi pada orang-orang Indoeropa di Hindia Belanda. Terhitung jumlah penduduk Eropa di Jawa dan Madura mencapai 75.833 jiwa, di antaranya 51.379 jiwa adalah Indoeropa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 merupakan Indo-Kecil. Para Indo kecil tersebut hidup dalam kemiskinan. Golongan Indo kecil mencapai 22% di Jawa dan Madura (Augusta, 2014). Di tahun yang sama *Koloniale verslagen* (laporan kolonial) (dalam Augusta, 2014) menyebutkan dalam persentase bahwa kemiskinan di kalangan penduduk Indoeropa di Jawa dan Madura cukup mencengangkan. Terhitung mencapai 11% di Batavia, 13% di Semarang, 12,6% di Banyumas, 14% di Pasuruan, 15,4% di Surakarta, 16,7% di Madiun, 18,8% di Kedu dan 17,3% di Madura.

Dari laporan Henri van Kol, *Koloniale verslagen* dan Van Hermerden dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan para Indoeropa sangat menyedihkan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak akibat dari peraturan-peraturan yang diskriminatif dari pemerintah Hindia Belanda serta ketidakmampuan para Indoeropa untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan hidup setelah keluar dari rumahnya (dari rumah Eropa).

Kesimpulan

Jawa menjadi salah satu wilayah penting dalam perkembangan situasi kolonial di Nusantara. Jawa dimodifikasi sedemikian rupa agar menyerupai Belanda. Gudang-gudang dibangun untuk menyimpan rempah-rempah. Kedatangan orang-orang Belanda mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Kepulauan Hindia Timur. Kebudayaan yang saling mempengaruhi membuat masyarakat Kepulauan Hindia Timur terbiasa akan kehidupan yang berdampingan dengan kebudayaan Belanda. Sehingga perkawinan antara penduduk lokal dengan orang-orang Belanda tidak dapat dihindari. Carel Reyniersz, dan penggantinya Joan Maetsuyker merupakan pendukung dari perkawinan antara pegawai VOC dengan perempuan Asia. Menurut Reyniersz, pernikahan dengan wanita Asia akan mengurangi pegawai VOC yang memperkaya diri karena perempuan Asia tidak terlalu serakah dibandingkan dengan perempuan Eropa, namun tidak semua laki-laki bisa mudah untuk menikah karena ada undang-undang yang mengatur pernikahan. Hal ini membuat pergundikan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Dari perkawinan antara lelaki Eropa dengan perempuan Asia kemudian melahirkan anak-anak Indoeropa. Anak-anak Indoeropa dianggap sebagai citra buruk bagi kalangan orang-orang Eropa. Diskriminasi yang terlihat jelas dalam kehidupan Indoeropa membuat mereka semakin tersingkir dari kehidupan orang-orang Eropa. Orang Indoeropa tidak dapat diterima karena dianggap tidak sejajar (ada darah campuran), bahkan orang bumiputra sebagian besar tidak dapat menerimanya. Orang-orang Eropa beranggapan bahwa para gundik (nyai) yang bersalah atas kelahiran anak Indoeropa. Perubahan gaya hidup laki-laki Eropa yang memiliki kecenderungan sama seperti kepada gaya hidup orang bumiputra mengharuskan pemerintah Hindia Belanda mengirim perempuan Eropa demi menjaga derajat dan martabat ke-Eropaan.

Daftar Rujukan

- Augusta, I. (2014). *Diskursus, kekuasaan, dan praktik kemiskinan di pedesaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Baay, R. (2010). *Nyai & pergundikan di Hindia Belanda*. Depok: Komunitas Bambu.
- Basherian, A. (2008). *Kebijakan formulasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam perspektif pembaharuan hukum pidana* (Tesis Jurusan Ilmu Hukum UNDIP). Tidak diterbitkan.
- Bergen, L. van. (2019). *The Dutch East Indies red cross, 1870-1950: on humanitarianism and colonialism*. Lanham: Lexington Books.
- Bloembergen, M. (2011). *Polisi zaman Hindia Belanda: dari kepedulian dan ketakutan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Boudewijn, P. (2016). 'You must have inherited this trait from your eurasian mother': The representation of mixed-race characters in Dutch colonial literature. *Dutch Crossing*, 40(3), 239–260.
- Coppel, C. A. (1997). Revisiting furnivall's 'plural society': colonial Java as a mestizo society? *Ethnic and racial studies*, 20(3), 562–579.

- Gouda, F. (1995). *Dutch culture overseas: praktik kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Hägerdal, H. (2009). *Responding to the West: essays on colonial domination and asian agency*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hellwig, T. (2007). *Citra kaum perempuan di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hewett, R. (2015). Children of decolonisation: postcolonial Indo (Eurasian) communities in Indonesia and the Netherlands. *Indonesia and the Malay World*, 43(126), 191–206.
- Ingelson, J. (2018). *Mahasiswa, nasionalisme & penjara: perhimpunan Indonesia 1923-1928*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kat Angelino, A. D. A. de. (1931). *Colonial policy. volume II The Dutch East Indies*. Netherlands: Springer Dordrecht.
- Klaveren, J. J. (1983). *The Dutch colonial system in the East Indies*. Netherlands: Springer Dordrecht.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: silang budaya jilid I batas-batas pembaratan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Luttikhuis, B. (2013). Beyond race: constructions of ‘Europeanness’ in late-colonial legal practice in the Dutch East Indies. *European Review of History: Revue Europeenne d’histoire*, 20(4), 539–558.
- Niel, R. van. (2009). *Munculnya elite modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Niwandhono, P. (2011). *Yang ter(di)lupakan: kaum indo dan benih nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- Roskies, D. M. E. (1988). Race and class in colonial writing: Instances from the Dutch East Indies. *Dutch Crossing*, 12(34), 15–39.
- Rush, J. R. (2013). *Jawa tempo doeloe: 650 tahun bertemu dunia Barat: 1330-1985*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soekiman, D. (2011). *Kebudayaan Indis: dari zaman kompeni sampai revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Veer, C. van’t. (2020). The sea voyage as a marriage snare: gender in novels about the passage between the Netherlands and the Dutch East Indies (1869–1891). *Dutch Crossing*, 44(3), 257–269.